

### **BAB III**

## **PERANAN ORGANISASI DHARMA WANITA DI KOTA BANJAR PATROMAN**

#### **A. Sekilas Mengenai Kota Banjar Patroman**

Menurut kamus bahasa Kawi Indonesia, Banjar memiliki arti lingkungan, baris, berderet, berbaris. Arti Kota Banjar menurut kamus istilah Karawitan Sunda yaitu berurutan, teratur tinggi rendahnya nada yang dimiliki oleh alat musik. Menurut kamus Bahasa Sunda, Banjar sama artinya dengan barang, benda yang diperlihatkan pada suatu tempat.<sup>1</sup> Banjar menjadi lambang suatu tempat yang memiliki arti suatu tempat dengan lingkungan yang tertata rapi dan merata dimulai dari kota sampai pada pelosok desa.

Kota Banjar pada saat ini lebih dikenal dengan sebutan Banjar Patroman. Nama Banjar Patroman berdasarkan pada lingkungan sumber daya alam dan keadaan geografis. Patroman dahulunya berawal dari sebuah daerah bernama Pataruman. Pataruman diambil dari kata tarum merupakan sejenis pohon perdu yang tumbuh di tepi Sungai Citarum.<sup>2</sup> Tarum digunakan oleh masyarakat sebagai nama daerah bernama Pataruman, kemudian nama Pataruman berubah menjadi nama Patroman. Banjar sampai saat ini dikenal dengan Banjar Patroman agar membedakan dengan nama Kota Banjar lainnya.

---

<sup>1</sup> Undang Sudrajat dkk, *Banjar Satu Dekade*. Bandung: YAF Publish, 2013, hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

Kota Banjar awalnya merupakan daerah Kota Administratif dari Kabupaten Ciamis. Kota Banjar kemudian mengalami perubahan dalam sistem pemerintahan sebanyak empat kali yaitu: Pertama tahun 1937-1940 sebagai kecamatan, kedua tahun 1941 sampai dengan 1 Maret 1992 Banjar sebagai ibu kota kewedanaan, ketiga tahun 1992 sampai dengan 20 Februari 2003 sebagai kotif (kota administratif) Banjar, terakhir tahun 21 Februari Kota Banjar menjadi kota pemerintahan sendiri.<sup>3</sup> Perubahan status pemerintahan yang dialami oleh Kota Banjar merupakan dinamika dari suatu wilayah

Pada tahun 1937 bupati Tumenggung Sunarya mengembangkan daerah Banjar menjadi ibukota kecamatan. Pemusatan kegiatan yang terkonsentrasi di satu wilayah ini kemudian disebut sebagai pusat lingkungan desa yang menyatu menjadi kesatuan sehingga lahirlah pusat Kecamatan Banjar yang berada di Desa Pataruman. Konsentrasi pusat pemerintahan saat itu berada pada seputar kegiatan sosial ekonomi, yaitu adanya kantor pemerintahan kecamatan, pasar tradisional, dan fasilitas-fasilitas sosial lain.<sup>4</sup> Pemusatan kegiatan ini merubah Kecamatan Banjar yang awalnya hanya pemukiman menjadi sebuah kecamatan. Perubahan Banjar menjadi kecamatan tidak bisa dipandang sebelah mata.

Pada tahun 1941 Kecamatan Banjar ditetapkan menjadi ibu kota kewedanaan. Ditetapkannya Kecamatan Banjar menjadi ibu kota

---

<sup>3</sup> Tim Fase. 2012. Patruman embrio Kota Banjar, *Fase*, Edisi Februari, hlm. 4.

<sup>4</sup> *Ibid.*

kewadanaan menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang dialami oleh Kecamatan Banjar semakin pesat. Banjar sebagai ibu kota kewadanaan ini menjadi salah satu wilayah pengembangan Kabupaten Ciamis sebagai kabupaten induk.<sup>5</sup> Banjar menjadi salah satu wilayah yang menjadi perhatian Kabupaten Ciamis karena letaknya strategis yang menghubungkan wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat.

Sekitar tahun 1990-an muncul pembicaraan-pembicaraan mengenai pemisahan dan pembentukan pemerintahan sendiri yang disebabkan oleh adanya kekecewaan masyarakat Banjar terhadap pemerintahan Kabupaten Ciamis. Pada akhirnya keluar kebijakan pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat saat itu mengeluarkan SK (Surat Keputusan) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No.031 Tahun 1990 untuk menata daerah otonom tingkat II yang ada di wilayah administratif Provinsi Jawa Barat menjadi 42 daerah otonom tingkat II yang salah satunya adalah Kotif Banjar. Pada tahun 1992 Banjar secara resmi menjadi Kotif Banjar.<sup>6</sup> Sejak resmi Banjar menjadi Kotif Banjar, maka terjadi perluasan daerah di sekitar Kotif Banjar.

Sekitar tahun 1993 setelah setahun penetapan Banjar menjadi Kotif, masyarakat Banjar mengalami titik jenuh. Pada tahun 1993 Kotif Banjar kehilangan fungsinya sebagai jalur transit disebabkan adanya kebijakan pemerintah daerah yang membuka jalur trayek langsung, seperti jalur

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

Jakarta menuju Pangandaran, Bandung menuju Pangandaran, Jakarta menuju Banjarsari, dan Bandung menuju Wangon, Jakarta menuju Bandung menuju Wangon yang pada saat itu mulai berkembang.<sup>7</sup> Kebijakan jalur trayek membuat Kotif Banjar hanya menjadi jalur lintasan dari arah Jawa Tengah menuju daerah-daerah yang ada di Jawa Barat atau dari arah Jawa Barat menuju daerah-daerah yang ada di Jawa Tengah.

Pada sekitar tahun 1993 timbul rasa kejenuhan dan kekecewaan masyarakat Kotif Banjar terhadap pemerintah Kabupaten Ciamis karena kurang memperhatikan Kotif Banjar dan hilangnya fungsi Kotif Banjar sebagai jalur transit. Faktor kekecewaan masyarakat menjadi alasan berpisahnya Banjar dari pemerintahan Kabupaten Ciamis. Pada saat itu pemisahan Banjar dari pemerintahan Kabupaten Ciamis belum dapat terlaksana karena ketika masa Orde Baru belum ada perundang-undangan yang mengatur tentang daerah otonom.<sup>8</sup> Belum adanya perundang-undangan yang mengatur tentang daerah otonom tidak menyurutkan semangat dari masyarakat Kotif Banjar untuk segera berpisah dari pemerintahan Kabupaten Ciamis dan mendirikan pemerintahan Kota Banjar.

Pada tahun 1999 baru ditetapkan undang-undang pembentukan daerah otonom. Penetapan undang-undang mengenai pembentukan daerah

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Dedi Suryadi pada tanggal 3 Maret 2013, dapat dilihat dalam lampiran hasil wawancara hlm. 181.

otonom baru diresmikan pada masa pemerintahan B.J Habibie.<sup>9</sup> Resmi ditetapkannya undang-undang pembentukan daerah otonom membuat masyarakat Banjar memiliki harapan besar untuk segera melakukan peningkatan status Kota Banjar dan berpisah dari pemerintah Kabupaten Ciamis.

Sejak tahun 1999 perjuangan tokoh masyarakat dan pejabat pemerintahan Kotif Banjar terus dilakukan demi terwujudnya pemisahan pemerintahan Banjar dengan pemerintahan Kabupaten Ciamis. Keinginan masyarakat Banjar kurang mendapat respon yang baik dari pemerintah Kabupaten Ciamis. Bupati Oma Sasmita mengeluarkan kebijakan yaitu menarik kembali para pejabat pemerintahan Kotif Banjar. Salah satu pejabat yang ditarik oleh Bupati Oma Sasmita adalah H.M Efendi Taufikurahman, SH, MH yang saat itu menjabat sebagai Walikotatif Banjar.<sup>10</sup> Penarikan Walikotatif ini berdampak kepada Kehidupan pemerintahan Kotif Banjar saat itu, karena melumpuhkan jalannya pemerintah di Kotif Banjar.

Pada tanggal 21 Februari 2003, disahkan peningkatan status dari Kotif Banjar menjadi Kota Banjar sesuai dengan UU No. 27 Tahun 2002. Peresmian status pemerintahan Kota Banjar dilakukan sebelum menjelang pemilu 2003, oleh karena itu untuk sementara untuk menjalankan lajunya

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Dedi Suryadi pada tanggal 3 Maret 2013, dapat dilihat dalam lampiran hasil wawancara hlm. 182.

pemerintahan di Kota Banjar maka diangkat penjabat sementara. Pada saat itu H.M Efendi Taufikurahman, SH, MH dilantik menjadi Pjs. Walikota Kota Banjar.<sup>11</sup> Sejak diresmikannya peningkatan status Kota Banjar maka secara resmi juga Kota Banjar berpisah dari pemerintahan Kabupaten Ciamis.

Kota Banjar merupakan sebuah kota kecil dengan memiliki daerah yang luas. Secara geografis Kota Banjar berada pada wilayah ujung timur Provinsi Jawa Barat. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah Kecamatan Pamarican dan Lakbok Kabupaten Ciamis. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Lakbok dan Wanareja Kabupaten Cilacap. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cimaragas dan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.<sup>12</sup> Keadaan geografis yang dimiliki oleh Kota Banjar menunjukkan bahwa letaknya berbatasan langsung dengan daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Ciamis.

Letak geografis Kotif Banjar ini berada pada posisi geografis 07<sup>0</sup> 19'-07<sup>0</sup>26' Lintang Selatan dan 108<sup>0</sup>26'-108<sup>0</sup>40' Bujur Timur. Daerah-daerah yang berada di Kotif Banjar sebagian besar berada pada ketinggian kurang dari 100 mdpl<sup>13</sup> yaitu mencapai 87,10 persen dan sisanya berada di ketinggian 100-500 mdpl.<sup>14</sup> Masyarakat Kota Banjar sebagian besar

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Bappeda Kota Banjar, *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjar Laporan Akhir*. Kota Banjar: Bappeda, 2004, hlm. 1.3.

<sup>13</sup> Mdpl adalah Meter diatas permukaan laut.

<sup>14</sup> Bappeda, *loc.cit.*

bermata pencaharian sebagai pedagang, baik dalam bidang jasa maupun dalam bidang barang, selain sebagai pedagang masyarakat Kota Banjar juga bermata pencaharian sebagai petani.

#### **B. Organisasi Dharma Wanita di Kota Banjar Patroman.**

Pada setiap provinsi, kabupaten dan kota terdapat organisasi Dharma Wanita. Organisasi Dharma Wanita di daerah-daerah ini bertugas untuk membantu organisasi Dharma Wanita yang berada di pusat. Keberadaan organisasi Dharma Wanita di Kota Banjar mengikuti perkembangan status yang terjadi di Kota Banjar. Organisasi Dharma Wanita ketika Kota Banjar berstatus kewadanaan, organisasi Dharma Wanita ketika Kota Banjar berstatus kotif, dan organisasi Dharma Wanita ketika Kota Banjar berstatus pemerintahan kota.<sup>15</sup> Perubahan status yang dialami Kota Banjar ikut mengubah keadaan organisasi Dharma Wanita yang berada di Kota Banjar.

Kota Banjar pada masa kewadanaan yang berlangsung sejak tahun 1941 sampai dengan tahun 1992 merupakan salah satu wilayah pengembangan Kabupaten Ciamis, segala aktivitas pemerintahan mengikut kepada pemerintahan Kabupaten Ciamis. Keadaan organisasi Dharma Wanita saat Kota Banjar berstatus sebagai kewadanaan menginduk

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Surtikayah Dahlan pada tanggal 1 Juli 2013, dapat dilihat dalam lampiran hasil wawancara hlm. 173.

kepada organisasi Dharma Wanita Ciamis.<sup>16</sup> Para anggota Dharma Wanita yang berada di Kota Banjar ketika masa kewadanaan menjalankan segala kegiatan di organisasi Dharma Wanita pemerintahan Kabupaten Ciamis.

Pada tahun 1992 sampai dengan tahun 2003 Kota Banjar mengalami peningkatan status dari kewadanaan menjadi kotif. Perubahan status menjadi kotif secara administratif organisasi Dharma Wanita Kotif Banjar terpisah dengan organisasi Dharma Wanita pemerintah Kabupaten Ciamis tetapi laporan pertanggung jawaban kegiatan diserahkan kepada organisasi Dharma Wanita di pemerintahan Kabupaten Ciamis.<sup>17</sup> Saat itu organisasi Dharma Wanita di Kotif Banjar masih belum bisa terlepas dari organisasi Dharma Wanita di pemerintahan Kabupaten Ciamis, meskipun secara administratif sudah terpisah dari organisasi Dharma Wanita Kabupaten Ciamis.

Pada masa menuju peningkatan status kotif menjadi pemerintahan kota terjadi penarikan terhadap para pejabat pemerintahan Kotif Banjar oleh Bupati Ciamis. Penarikan pejabat pemerintah berpengaruh terhadap keberadaan organisasi Dharma Wanita di Kotif Banjar. Saat penarikan yang dilakukan Bupati Ciamis terhadap para pejabat pemerintahan Kotif Banjar, maka para istri dari anggota organisasi Dharma Wanita di Kotif Banjar secara otomatis menjadi organisasi Dharma Wanita di pemerintahan Kabupaten Ciamis. Penarikan para pejabat pemerintahan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*, lihat lampiran hlm. 173-174



Kotif Banjar oleh pemerintahan Kabupaten Ciamis membuat organisasi Dharma Wanita di Kotif Banjar menjadi vakum.<sup>18</sup> Sifat anggota organisasi Dharma Wanita ditentukan sesuai dengan jabatan dan tempat sang suami berkerja.

Organisasi Dharma Wanita di Kotif Banjar sesudah penarikan pejabat pemerintahan tidak dibubarkan dan tetap dibiarkan menjadi sebuah organisasi, tetapi tidak ada pengurus di dalam organisasi Dharma Wanita. Organisasi Dharma Wanita yang anggota-anggotanya masih berada di Kotif Banjar saat itu hanya sebatas perkumpulan bagi para istri PNS, karena apabila menjadi sebuah organisasi maka harus ada struktur organisasi dan penanggung jawab dari organisasi. Kegiatan yang dilakukan oleh perkumpulan dari para istri-istri dari PNS ini seperti kegiatan arisan dan berkumpul.<sup>19</sup> Kegiatan arisan dan berkumpul para istri-istri PNS merupakan salah satu cara agar para istri tetap bersatu meskipun tidak dalam sebuah organisasi.

Kegiatan organisasi Dharma Wanita di pusat pada masa akhir Orde Baru mengalami vakum. Vakumnya organisasi Dharma Wanita karena dianggap sebagai pendukung dari pemerintahan Orde Baru dan merupakan alat politik presiden Soeharto saat itu. Organisasi Dharma Wanita baru aktif kembali pada masa Reformasi ketika Gus Dur menjabat sebagai

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, lampiran hlm.174.

<sup>19</sup> *Ibid.*

presiden RI.<sup>20</sup> Organisasi Dharma Wanita pada masa Reformasi berbeda dengan organisasi Dharma Wanita pada masa Orde Baru. Perbedaan organisasi Dharma Wanita Orde Baru dan Reformasi dilihat dari perubahan nama, hymne dan mars.<sup>21</sup> Perubahan nama, hymne dan mars organisasi Dharma Wanita ditambah menjadi Organisasi Dharma Wanita Persatuan.

Organisasi Dharma Wanita saat masa Orde Baru dipandang oleh masyarakat saat itu merupakan sumber kekuatan politik masa pemerintahan Orde Baru. Pandangan masyarakat terhadap organisasi Dharma Wanita karena organisasi Dharma Wanita saat itu merupakan organisasi para istri PNS, sedangkan masa Orde Baru PNS menyumbangkan suara terbesar bagi Partai Golkar yang memenangkan kembali presiden Soeharto saat pemilu.<sup>22</sup> Masa Orde Baru organisasi Dharma Wanita dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan politik, tetapi masa Reformasi organisasi Dharma Wanita tidak dikaitkan dengan kegiatan politik. Organisasi Dharma Wanita ketika masa Reformasi hanya untuk melakukan pembinaan-pembinaan terhadap para istri anggota Dharma Wanita.

---

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Tarbiyah pada tanggal 17 Maret 2013, dapat dilihat dalam lampiran hasil wawancara hlm. 179.

<sup>21</sup> Hymne dan Mars organisasi Dharma Wanita dapat dilihat dalam lampiran hlm. 126.

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan Tarbiyah pada tanggal 17 Maret 2013, dapat dilihat dalam lampiran hasil wawancara hlm. 179.

Penulis menyimpulkan bahwa faktor yang membuat vakum organisasi Dharma Wanita di Kotif Banjar terjadi karena dua sebab yaitu sebab khusus dan sebab umum. Sebab khusus vakumnya organisasi Dharma Wanita dikarenakan oleh penarikan pejabat pemerintahan Kotif Banjar saat itu. Sebab umum vakumnya organisasi Dharma Wanita di Kotif Banjar dikarenakan oleh vakumnya organisasi Dharma Wanita di pusat saat masa transisi pemerintahan Orde Baru ke masa Reformasi.

Pemerintah Kotif Banjar pada saat menjelang pembentukan pemerintahan dan peningkatan status Kota Banjar mulai merencanakan untuk mengaktifkan kembali organisasi Dharma Wanita yang sempat vakum. Rencana pembentukan kembali organisasi Dharma Wanita di Kotif Banjar terjadi pada tahun 2001 ketika pemerintah Kotif Banjar juga merancang mengenai pembentukan Kota Banjar. Pada tahun 2001 secara resmi pemerintahan Kotif Banjar membentuk dan mengaktifkan kembali organisasi Dharma Wanita di Kotif Banjar.<sup>23</sup> Pembentukan organisasi Dharma Wanita di Kotif Banjar dilakukan setelah dilakukan penarikan para pejabat pemerintahan Kotif Banjar.

Organisasi Dharma Wanita di Kotif Banjar baru aktif kembali ketika masa transisi pemerintahan dari kotif menjadi pemerintahan kota. Pada masa transisi pemerintahan diangkat para pejabat sementara di Kotif Banjar untuk menjalankan jalannya pemerintahan Kotif Banjar. Saat masa

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Kurniati Darmadji pada tanggal 11 November 2013, dapat dilihat dalam lampiran hasil wawancara hlm. 169.

transisi pemerintah kabupaten mengangkat kepala Sekda di Kotif Banjar yaitu Memet dan secara otomatis istri dari kepala Sekda menjadi ketua organisasi Dharma Wanita di Kotif Banjar. Ketua organisasi Dharma Wanita pada masa transisi dijabat oleh Tuti Memet.<sup>24</sup> Pemilihan ketua organisasi Dharma Wanita saat itu masih berdasarkan jabatan dan kedudukan sang suami pada pekerjaannya di kantor.

Proses terbentuknya organisasi Dharma Wanita di Kotif Banjar terbentuk secara otomatis. Pada saat masa transisi pemerintahan maka pemerintah Kotif Banjar melakukan pengaktifan serta melakukan pembentukan kembali struktur organisasi Dharma Wanita di Kotif Banjar.<sup>25</sup> Pembentukan kembali organisasi Dharma Wanita untuk dapat berperan dalam mensukseskan proses peningkatan status kota Banjar.

Pada saat pembentukan kembali organisasi Dharma Wanita yang dilakukan oleh pemerintah Kotif Banjar, organisasi ini masih belum bisa terlepas dari organisasi Dharma Wanita yang berada di Kabupaten Ciamis. Pada tahun 2003 setelah secara resmi Kota Banjar lepas dari pemerintahan Ciamis, maka organisasi Dharma Wanita di Kota Banjar lepas dari organisasi Dharma Wanita di pemerintahan Kabupaten Ciamis.

Latar belakang pemerintahan Kotif Banjar menggerakkan dan mengaktifkan kembali organisasi Dharma Wanita di Kota Banjar karena organisasi Dharma Wanita merupakan wadah bagi para istri dari PNS.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, lampiran hlm. 169-170.

<sup>25</sup> *Ibid.*

Organisasi Dharma Wanita ini dibentuk sebagai istri yang mendampingi dan mendukung kinerja sang suami dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat.<sup>26</sup> Pembentukan kembali organisasi Dharma Wanita di pemerintahan Kotif Banjar diharapkan dapat ikut berperan dalam usaha peningkatan status meskipun mereka hanya sebatas mendukung para suami mereka sebagai pejabat pemerintah yang berjuang untuk meningkatkan status Kotif Banjar.

Keadaan organisasi Dharma Wanita di kotif Banjar saat masa transisi pemerintahan seperti seorang bayi baru lahir yang belum bisa melakukan kegiatan apa-apa. Awal berdirinya organisasi Dharma Wanita di Kotif Banjar hanya dapat melakukan kegiatan-kegiatan pembentukan struktur organisasi Dharma Wanita Kotif Banjar.<sup>27</sup> Pembentukan struktur organisasi Dharma Wanita masa transisi menunjukkan bahwa organisasi Dharma Wanita secara administratif anggota organisasi Dharma Wanita di Kotif Banjar sudah berpisah dengan organisasi Dharma Wanita yang berada di pemerintahan Kabupaten Ciamis.

Pada awal pembentukan organisasi Dharma Wanita di Kotif Banjar jumlah anggota organisasi belum diketahui secara jelas.<sup>28</sup> Pendataan anggota organisasi Dharma Wanita belum dapat dilakukan ketika masa

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, lampiran hlm. 169.

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Tuti Memet pada tanggal 14 November 2013, dapat dilihat dalam lampiran hasil wawancara hlm. 159.

<sup>28</sup> *Ibid.*, lampiran hlm. 160.

transisi pemerintahan. Saat masa ini anggota organisasi Dharma Wanita di Kotif Banjar masih belum jelas.

Kantor kesekretariatan organisasi Dharma Wanita ketika awal berdiri terletak di salah satu ruangan pendopo Kotif Banjar.<sup>29</sup> Pendopo Kotif Banjar saat itu masih sebagai pusat pemerintahan di Kota Banjar. Pada saat itu, pendopo digunakan sebagai pusat kegiatan pemerintahan Kota Banjar. Pendopo saat itu tidak hanya menjadi pusat kegiatan pemerintahan di Kota Banjar tetapi digunakan juga menjadi gedung pertemuan.

Hubungan organisasi Dharma Wanita yang ada di kota Banjar dengan organisasi Dharma Wanita yang berada di pemerintah Kabupaten Ciamis ketika masa transisi masih tetap terjalin. Organisasi Dharma Wanita di Kotif Banjar meskipun secara administratif sudah terpisah, tetapi laporan kegiatan organisasi Dharma Wanita di Kota Banjar ketika masa transisi masih dipertanggungjawabkan terhadap organisasi Dharma Wanita yang berada di pemerintahan Kabupaten Ciamis.<sup>30</sup> Laporan kegiatan organisasi Dharma Wanita di Kotif Banjar saat masa transisi memang tidak bisa dipertanggungjawabkan langsung ke tingkat provinsi, karena status Kotif Banjar saat itu masih belum jelas.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi Dharma Wanita ketika masa transisi pemerintah Kotif Banjar masih belum dapat terlaksana dengan efektif. Pada masa transisi pemerintahan belum pernah

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, lihat lampiran hlm. 159-160.

<sup>30</sup> *Ibid.*, lihat lampiran hlm. 160 -161

dilaksanakannya pertemuan secara rutin antara organisasi Dharma Wanita yang berada di Kotif Banjar dengan organisasi Dharma Wanita yang berada di pemerintahan Kabupaten Ciamis. Pertemuan hanya dilakukan apabila mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilakukan oleh organisasi Dharma Wanita.<sup>31</sup> Organisasi Dharma Wanita di Kotif Banjar ketika masa transisi pemerintahan banyak hal yang harus dibenahi oleh organisasi Dharma Wanita, termasuk dalam mengumpulkan para istri-istri dari PNS untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi Dharma Wanita.

Menjelang saat peningkatan status Kotif Banjar menjadi pemerintahan Kota Banjar, organisasi Dharma Wanita ini menyambut dengan baik kabar akan dilaksanakan peningkatan status Kotif menjadi pemerintahan kota. Organisasi Dharma Wanita tidak hanya menyambut dengan baik tetapi ikut berpartisipasi mendukung peningkatan status Kota Banjar. Pada masa transisi pemerintahan Kota Banjar organisasi Dharma Wanita melakukan pembenahan dan penataan.<sup>32</sup> Penatan dan pembenahan yang dilakukan oleh organisasi Dharma Wanita adalah salah satu usaha mendukung dalam peningkatan status di pemerintahan Kota Banjar. Organisasi Dharma Wanita merupakan organisasi yang penting dalam jalannya pemerintahan Kota Banjar maka diperlukannya suatu usaha pembenahan dan penataan di dalam organisasi Dharma Wanita.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, lihat lampiran hlm. 161.

<sup>32</sup> *Ibid.*, lihat lampiran hlm. 161-162

Perubahan status menjadi Kota Banjar tidak hanya dirasakan dalam bidang pemerintahan saja melainkan pada semua bidang kehidupan masyarakat Kota Banjar. Masa sesudah peningkatan status Kota Banjar, organisasi Dharma Wanita mengalami perubahan-perubahan. Sejak Kota Banjar lepas dari pemerintahan Kabupaten Ciamis maka organisasi Dharma Wanita juga ikut berpisah dengan organisasi Dharma Wanita di pemerintahan Kabupaten Ciamis.<sup>33</sup> Organisasi Dharma Wanita di Kota Banjar tidak lagi mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilakukan ke organisasi Dharma Wanita yang berada di pemerintahan Kabupaten Ciamis, pertanggung jawaban dilakukan langsung ke organisasi Dharma Wanita pusat.

Keadaan organisasi Dharma Wanita sesudah peningkatan status Kota Banjar, mulai aktif sebagai organisasi para istri PNS di Kota Banjar. Organisasi Dharma Wanita mulai melakukan pembentukan struktur organisasi dan mulai melakukan perancangan mengenai program kegiatan.<sup>34</sup> Pembentukan struktur organisasi Dharma Wanita bertujuan agar pembagian kerja di dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Kegiatan organisasi Dharma Wanita ketika masa peningkatan status Kota Banjar belum dapat berjalan sepenuhnya, karena organisasi Dharma Wanita di pemerintahan Kota Banjar masih terfokus dengan kegiatan-

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, lihat lampiran hlm. 162-163.

<sup>34</sup> *Ibid.*, lihat lampiran hlm. 163



kegiatan untuk mengumpulkan para istri PNS. Usaha mengumpulkan para istri-istri PNS agar mereka mau berperan aktif dalam organisasi Dharma Wanita.<sup>35</sup> Mengaktifkan kembali kegiatan-kegiatan organisasi Dharma Wanita dan menunjukkan eksistensi organisasi Dharma Wanita di pemerintahan Kota Banjar merupakan tugas bagi Tuti Memet selaku ketua organisasi Dharma Wanita di pemerintahan Kota Banjar ketika masa awal pemerintahan Kota Banjar.

Tahun 2005, kepala Sekda Kota Banjar pensiun, maka secara otomatis jabatan istri sebagai ketua organisasi Dharma Wanita harus diserahkan kepada istri kepala Sekda yang akan menjabat. Tahun 2005 secara resmi Ooh Suherli diangkat menjadi ketua organisasi Dharma Wanita masa periode 2005-2008.<sup>36</sup> Pemilihan ketua organisasi Dharma Wanita masa ini masih berdasarkan jabatan sang suami istri dari kepala sekda pasti akan menjadi ketua organisasi Dharma Wanita.

Pada tahun 2005 berdasarkan anjuran Walikota Kota Banjar Herman Sutrisno agar organisasi Dharma Wanita untuk aktif kembali dalam melakukan kegiatan-kegiatan di Kota Banjar. Organisasi Dharma Wanita yang diketuai oleh Ooh Suherli mulai aktif dalam kegiatan-kegiatan di dalam organisasi Dharma Wanita maupun dalam kegiatan pemerintah Kota Banjar. Anjuran Walikota Kota Banjar ini karena organisasi Dharma

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Kurniati Darmadji pada tanggal 11 November 2013, dapat dilihat dalam lampiran hasil wawancara hlm. 170.

Wanita merupakan organisasi untuk mewadahi kegiatan-kegiatan para istri PNS.<sup>37</sup> Organisasi Dharma Wanita pada masa ini mendapat dukungan dari Walikota Kota Banjar, maka organisasi Dharma Wanita lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatannya baik di dalam organisasi Dharma Wanita maupun di luar organisasi Dharma Wanita.

Pada periode 2005-2008 jumlah anggota organisasi Dharma Wanita semakin bertambah tetapi berapa jumlah secara pasti tidak diketahui, karena data-data mengenai jumlah anggota organisasi pada periode ini tidak ditemukan. Struktur organisasi Dharma Wanita pada periode tahun 2005-2008 yaitu ketua: Ooh Suherli, wakil ketua I: Darmadji, wakil Ketua II: Saeful Anwar, wakil ketua II: Feny Fachrudin, Sekretaris: Yayat Supriyatna, bendahara: Sardjono, Ketua bidang pendidikan: Dedi Kusnendar, Ketua bidang Sosial budaya: Tomy Subagja, Ketua bidang Ekonomi: Ibu Mardono.<sup>38</sup> Organisasi Dharma Wanita pada periode ini menunjukkan bahwa organisasi ini mulai aktif dan para istri organisasi Dharma Wanita dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan struktur organisasi Dharma Wanita.

Perkembangan status Kota Banjar berpengaruh terhadap terbentuknya organisasi Dharma Wanita. Pada masa Kota Banjar masih menjadi kewadaanan dan kotif organisasi Dharma Wanita masuk dalam organisasi Dharma Wanita yang berada di Ciamis. Sejak pemerintahan Kota Banjar

---

<sup>37</sup> Hasil Wawancara dengan Ooh Suherli pada tanggal 19 November 2013, dapat dilihat dalam lampiran hasil wawancara hlm. 165.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 166.

berdiri sendiri dan terlepas dari pemerintahan Ciamis, maka pemerintahan Kota Banjar membentuk organisasi Dharma Wanita di Kota Banjar. Organisasi Dharma Wanita di Kota Banjar setelah peningkatan status dari kotif menjadi pemerintahan kota, maka organisasi Dharma Wanita di pemerintahan Kota Banjar tidak menginduk kepada organisasi Dharma Wanita yang berada di pemerintahan Kabupaten Ciamis.

Organisasi Dharma Wanita di Kota Banjar memiliki karakteristik yang berbeda dengan organisasi Dharma Wanita yang berada di daerah lainnya. Karakteristik yang dimiliki oleh organisasi Dharma Wanita di Kota Banjar adalah ikut berperan dalam proses pembentukan pemerintahan Kota Banjar. Organisasi Dharma Wanita setelah pembentukan pemerintah Kota Banjar memasukan visi dan misi dari Kota Banjar pada program kegiatan yang dilaksanakan.

### **C. Peranan Organisasi Dharma Wanita di Kota Banjar.**

Organisasi Dharma Wanita memiliki program kerja, dalam program kerja ini mengatur segala kegiatan yang akan dilaksanakan. Program kerja organisasi Dharma Wanita terbagi menjadi tiga bidang yaitu: bidang pendidikan, bidang sosial budaya, dan bidang ekonomi. Pada setiap bidang organisasi Dharma Wanita memiliki peran bagi organisasi Dharma Wanita itu sendiri ataupun peran bagi diluar organisasi Dharma Wanita.

Program kerja yang dilaksanakan oleh para anggota organisasi Dharma Wanita yang berada di provinsi, kabupaten dan kota mengacu

terhadap program organisasi Dharma Wanita yang berada di pusat. Organisasi Dharma Wanita yang berada di pusat dijadikan dasar acuan bagi organisasi Dharma Wanita yang berada di provinsi, kabupaten dan kota, tetapi disesuaikan kembali dengan keadaan daerah masing-masing organisasi Dharma Wanita.<sup>39</sup> Setiap organisasi Dharma Wanita di setiap masing-masing daerah mempunyai keadaan yang berbeda, oleh sebab itu program kerja Dharma Wanita menyesuaikan dengan keadaan setiap daerah masing-masing tetapi program kegiatan tetap mengacu kepada pusat.

Anggota organisasi Dharma Wanita yang berada di pemerintahan Kabupaten Ciamis terdiri dari para istri-istri yang berkerja dari PNS yang bekerja di daerah sekitar Kabupaten Ciamis ataupun di daerah tingkat kecamatan. Pada sebelum peningkatan status masih menginduk kepada organisasi Dharma Wanita di Kabupaten Ciamis. Organisasi Dharma Wanita di Kabupaten Ciamis bertanggung jawab atas keberlangsungan organisasi Dharma Wanita di Kecamatan Banjar.<sup>40</sup> Semua kegiatan organisasi Dharma Wanita yang berada di Kecamatan Banjar dipertanggung jawabkan kepada organisasi Dharma Wanita Ciamis.

Pada saat sebelum Banjar masih menjadi kecamatan dan kotif, organisasi Dharma Wanita yang berada di kecamatan mempunyai peran

---

<sup>39</sup> Hasil Wawancara dengan Tarbiyah pada tanggal 17 Maret 2013, dapat dilihat dalam lampiran hasil wawancara hlm. 179-180.

<sup>40</sup> *Ibid.*, lampiran hasil wawancara hlm. 180.

yang penting bagi pemerintahan Kabupaten Ciamis. Organisasi Dharma Wanita yang berada di tingkat kecamatan ikut berperan dalam mensukseskan program-program pemerintah Kabupaten Ciamis. Organisasi Dharma Wanita yang berada di Kecamatan Banjar berperan dalam mensukseskan jalannya program kerja organisasi Dharma Wanita di Kecamatan Banjar, organisasi Dharma Wanita juga berperan dalam mensukseskan program-program pemerintahan Kabupaten Ciamis.

Pada saat itu di daerah Kabupaten Ciamis dan sekitarnya termasuk Kecamatan Banjar jumlah buta huruf, dan buta angka masih cukup tinggi. Pemerintah Kabupaten Ciamis membuat program untuk memberantas buta huruf, buta angka di kalangan masyarakat yang berada di sekitar wilayah Ciamis, Banjar, Pangandaran, dan daerah-daerah yang masih termasuk dalam kekuasaan pemerintah Ciamis. Organisasi Dharma Wanita ikut berperan dalam program yang diadakan oleh pemerintah, tetapi pemberantasan buta huruf dan buta angka hanya dilaksanakan pada para anggota organisasi Dharma Wanita.

Pada saat itu jumlah anggota organisasi Dharma Wanita yang berada di Ciamis atau di Banjar cukup banyak, sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pengajaran mengenai baca, tulis dan menghitung bagi anggota organisasi Dharma Wanita. Pembinaan dan pengajaran mengenai baca, tulis dan menghitung merupakan program organisasi Dharma Wanita dalam bidang pendidikan.<sup>41</sup> Pembinaan dan pengajaran mengenai baca,

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

tulis, dan menghitung bagi para istri anggota Dharma Wanita merupakan perwujudan bahwa organisasi Dharma Wanita ikut berperan dalam mensukseskan program-program pemerintah dan menunjang karir dan pekerjaan sang suami.

Program pemerintah Kabupaten Ciamis yang masuk dalam program organisasi Dharma Wanita yaitu program KB untuk mengurangi jumlah kelahiran. Pada saat itu jumlah penduduk di Indonesia sangat padat untuk mengurangi jumlah angka kelahiran maka pemerintah Orde Baru menggalakan program KB. Organisasi Dharma Wanita saat itu ikut mensukseskan program KB bagi para istri-istri anggota Dharma Wanita. Program KB ini dimasukkan dalam program kerja organisasi Dharma Wanita pada bidang sosial budaya. Organisasi Dharma Wanita dalam mensukseskan program KB melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai manfaat program KB bagi istri-istri anggota organisasi Dharma Wanita.<sup>42</sup> Program kerja organisasi Dharma Wanita memasukan program KB agar mensukseskan program pemerintahan dalam mengurangi jumlah kepadatan penduduk di Indonesia.

Bidang ekonomi, organisasi Dharma Wanita ikut berperan dalam menyejahterakan anggotanya. Para anggota organisasi Dharma Wanita di bidang ekonomi menggalakan koperasi untuk menyediakan kebutuhan para anggota organisasi Dharma Wanita. Pada masa pemerintahan presiden Soeharto, program koperasi sedang digalakan dan para PNS

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

diwajibkan untuk menjadi anggota koperasi.<sup>43</sup> Program koperasi yang ada di organisasi Dharma Wanita setidaknya dapat menyejahterakan keluarga anggota organisasi Dharma Wanita.

Pada masa Kota Banjar sudah resmi melepaskan diri dari pemerintahan Kabupaten Ciamis, secara otomatis organisasi Dharma Wanita di Kota Banjar tidak lagi menginduk kepada organisasi Dharma Wanita yang berada di Ciamis. Pada waktu pemerintahan kotif, organisasi Dharma Wanita yang sempat vakum mulai dibentuk dan diaktifkan kembali. Menjelang peningkatan status Kotif Banjar terjadi masa transisi pemerintahan, ketika masa ini pemerintah kotif mulai mengaktifkan kembali dan membentuk organisasi Dharma Wanita yang berada di Kotif Banjar. Pembentukan dan pengaktifan organisasi Dharma Wanita di Kotif Banjar saat itu agar organisasi Dharma Wanita ikut berperan dalam proses peningkatan status yang akan segera dilakukan.

Para istri anggota organisasi Dharma Wanita berperan mendukung para suami mereka yang menjabat sebagai para staf pemerintahan, pejabat, dan anggota PNS dalam proses peningkatan Kotif Banjar menjadi pemerintahan Kota Banjar.<sup>44</sup> Peranan yang dilakukan oleh para anggota organisasi Dharma Wanita memang tidak secara langsung terhadap proses peningkatan status. Dukungan yang dilakukan para istri

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Hasil Wawancara dengan Tuti Memet pada tanggal 14 November 2013, dapat dilihat dalam lampiran hasil wawancara hlm. 163-164.

terhadap suami yang menjabat sebagai para staf pemerintahan, pejabat, dan anggota PNS dalam memperjuangkan proses peningkatan status Kota Banjar.

Organisasi Dharma Wanita ikut berperan dalam proses pembentukan pemerintah Kota Banjar. Peran organisasi Dharma Wanita menjelang pembentukan pemerintah dan peningkatan status melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat Banjar bahwa Kotif Banjar akan berpisah dengan pemerintahan Kabupaten Ciamis dan statusnya akan ditingkatkan menjadi pemerintahan Kota Banjar.<sup>45</sup> Peran yang dilakukan anggota organisasi Dharma Wanita dalam pembentukan pemerintah Kota Banjar tidak hanya dengan melakukan dukungan terhadap para suami mereka.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh organisasi Dharma Wanita berkerja sama dengan instansi pemerintahan Kotif Banjar, organisasi masyarakat dan organisasi wanita lainnya seperti organisasi PKK. Sosialisasi yang dilakukan oleh organisasi Dharma Wanita bertujuan agar masyarakat ikut berpartisipasi dan memberikan dukungan terhadap pembentukan pemerintahan dan peningkatan status Kota Banjar. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh organisasi Dharma Wanita menunjukkan bahwa organisasi Dharma Wanita berperan aktif di masyarakat untuk mendukung pembentukan pemerintahan dan peningkatan status Kota Banjar.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*



Masa sesudah peningkatan status organisasi Dharma Wanita tetap menjalankan perannya sebagai istri sebagai pendukung dan pendamping suami dalam kinerjanya. Peranan organisasi Dharma Wanita sesudah peningkatan status berperan dalam mensukseskan program-program pemerintahan Kota Banjar. Program-program pemerintahan Kota Banjar meskipun masih belum dapat dilaksanakan dalam program kegiatan Dharma Wanita.<sup>46</sup> Pada awal setelah peningkatan status Kota Banjar program pemerintah belum dapat dilaksanakan oleh organisasi Dharma Wanita, karena ketika masa ini organisasi Dharma Wanita masih terfokus dengan pembenahan dan penataan.

Pada periode 2005-2008, saat Ooh Suherli menjabat sebagai ketua organisasi Dharma Wanita di Kota Banjar program-program pemerintah Kota Banjar baru dapat dilaksanakan. Para anggota Dharma Wanita juga diberikan pembinaan mengenai bagaimana menciptakan keluarga yang sejahtera. Terciptanya sebuah keluarga yang sejahtera dan harmonis maka sang suami yang berkerja di jajaran pemerintahan dan sebagai PNS akan dapat meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat.

Pada periode 2005-2008 organisasi Dharma Wanita tidak hanya berperan dalam mensukseskan program kegiatan organisasi Dharma Wanita tetapi mereka ikut berperan dalam program pemerintah Kota Banjar. Organisasi Dharma Wanita meskipun ikut berperan dalam

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 164.

mensukseskan program pemerintah Kota Banjar tetapi organisasi Dharma Wanita tidak melupakan peran dalam organisasi Dharma Wanita sebagai istri pendamping suami dalam menunjang karirnya dan menjalankan program-program kegiatan organisasi Dharma Wanita di Kota Banjar

Pada tahun 2008 organisasi Dharma Wanita Persatuan Kota Banjar berperan dalam mensukseskan kegiatan pemerintahan Kota Banjar. Kegiatan dalam rangka mensukseskan kegiatan pemerintah Kota Banjar antara lain: menghadiri peringatan hari-hari besar keagamaan, mengikuti upacara kegiatan dalam memperingati hari besar nasional, menghadiri hari jadi organisasi kemasyarakatan yang ada di kota Banjar, menghadiri pelantikan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Kota Banjar.<sup>47</sup> Kegiatan ini dilaksanakan oleh pemerintah Kota Banjar bersama dengan organisasi Dharma Wanita dan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain yang ada di Kota Banjar.

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi Dharma Wanita ini termasuk kegiatan secara umum yang dilakukan oleh para anggota organisasi Dharma Wanita. Para anggota organisasi Dharma Wanita biasanya terlibat dalam kegiatan program kerja Dharma Wanita sebagai panitia, peserta maupun sebagai tamu undangan.<sup>48</sup> Organisasi Dharma

---

<sup>47</sup> Laporan Pelaksanaan Program Kerja Dharma Wanita Persatuan Kota Banjar Tahun 2008, 2008, Kota Bajar: Dharma Wanita Persatuan Kota Banjar, dapat dilihat dalam lampiran Laporan kegiatan organisasi Dharma Wanita. hlm. 144-145.

<sup>48</sup> Hasil Wawancara dengan Ooh Suherli pada tanggal 19 November 2013, dapat dilihat dalam lampiran hasil wawancara hlm. 167.

Wanita ikut berpartisipasi dalam kegiatan di luar program kerja untuk berperan dalam mensukseskan program pemerintah Kota Banjar.

Pemerintah Kota Banjar memiliki komitmen dalam meningkatkan angka partisipasi murni, melek huruf dan peningkatan mutu pendidikan melalui pembebasan biaya pendidikan mulai dari tingkat SD sampai SMP dan bantuan beasiswa yang terancam Drop Out mulai dari tingkat SD, SMP, SMA/SMK. Organisasi Dharma Wanita Persatuan di Kota Banjar mempunyai peranan dalam bidang pendidikan.

Organisasi Dharma Wanita memiliki program kegiatan dalam bidang pendidikan. Program kegiatan organisasi Dharma Wanita Kota Banjar dalam bidang pendidikan terdiri dari: Keagamaan, Pendidikan sekolah, pendidikan luar sekolah dan perpustakaan.<sup>49</sup> Program kegiatan dalam bidang pendidikan sudah disesuaikan dengan keadaan pendidikan di Kota Banjar.

Peran organisasi Dharma Wanita dalam bidang pendidikan berperan mensukseskan dalam program kegiatan organisasi Dharma Wanita. Organisasi Dharma Wanita juga berperan dalam mensukseskan program pemerintah Kota Banjar dalam pendidikan. Kegiatan yang dilakukan oleh organisasi Dharma Wanita di bidang pendidikan diharapkan dapat

---

<sup>49</sup> Laporan Pelaksanaan Program Kerja Dharma Wanita Persatuan Kota Banjar Tahun 2008, 2008, Kota Banjar: Dharma Wanita Persatuan Kota Banjar, dapat dilihat dalam lampiran Laporan kegiatan organisasi Dharma Wanita. hlm. 149-152.

mensukseskan program pemerintahan Kota Banjar pada bidang pendidikan.

Peranan yang ditunjukkan oleh anggota organisasi Dharma Wanita dalam mensukseskan program pemerintah Kota Banjar untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun bagi masyarakat. Pada tanggal 5 Februari 2008 organisasi Dharma Wanita memberikan pemberian bantuan gerakan nasional percepatan dan penuntasan wajib belajar 9 tahun di SDN 1 Purwaharja Kota Banjar.<sup>50</sup> Kegiatan pemberian bantuan gerakan nasional merupakan salah satu peranan yang dilakukan organisasi Dharma Wanita dalam bidang pendidikan, untuk mensukseskan program wajib belajar 9 tahun di Kota Banjar.

Organisasi Dharma Wanita memiliki program kegiatan dalam bidang ekonomi. Program kegiatan dalam bidang ekonomi yang dilaksanakan oleh para anggota Dharma Wanita di Kota Banjar adalah pemupukan dana, pembinaan dan pemberdayaan ekonomi dan koperasi.<sup>51</sup> Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Dharma Wanita sudah disesuaikan dengan keadaan perekonomian di Kota Banjar.

---

<sup>50</sup> *Ibid*, dapat dilihat dalam lampiran foto kegiatan organisasi Dharma Wanita. hlm. 136.

<sup>51</sup> *Ibid*, dapat dilihat dalam lampiran Laporan kegiatan organisasi Dharma Wanita. hlm. 152-154.

Organisasi Dharma Wanita dan TP PKK Kota Banjar melakukan pemberian modal bantuan terhadap UP2K.<sup>52</sup> Kegiatan yang dilakukan oleh anggota organisasi Dharma Wanita tidak hanya memiliki peran dalam dalam mensukseskan program kerja organisasi Dharma Wanita di bidang ekonomi. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi Dharma Wanita dalam bidang ekonomi ikut berperan dalam mensukseskan program kerja organisasi Dharma Wanita dan program pemerintahan Kota Banjar.

Kebijakan pemerintah Kota Banjar dalam perekonomian yaitu dengan cara meningkatkan daya beli masyarakat Kota Banjar. Program kerja Dharma Wanita dalam bidang ekonomi dengan menjual hasil-hasil karya yang dibuat oleh anggota organisasi Dharma Wanita di Kota Banjar ataupun hasil karya yang dibuat oleh masyarakat. Penjualan yang biasanya dilakukan oleh para istri anggota organisasi Dharma Wanita biasanya berupa hasil karya keterampilan seperti kerajinan tangan, maupun berupa masakan.<sup>53</sup> Kegiatan penjualan hasil karya keterampilan merupakan peranan organisasi Dharma Wanita untuk mensukseskan program pemerintah dalam meningkatkan daya beli di masyarakat Kota Banjar.

Program kegiatan yang dilakukan oleh organisasi Dharma Wanita dalam bidang sosial budaya adalah dengan terwujudnya peningkatan

---

<sup>52</sup> *Ibid*, dapat dilihat dalam lampiran foto kegiatan organisasi Dharma Wanita. hlm. 139.

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Kurniati Darmadji pada tanggal 11 November 2013, dapat dilihat dalam lampiran hasil wawancara hlm. 172.

kesejahteraan anggota dan keluarga secara lahir dan batin dalam upaya menuju keluarga bahagia yang berkualitas dan berbudaya. Kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota organisasi Dharma Wanita di bidang sosial budaya yaitu meningkatkan ketahanan keluarga, meningkatkan kesetiakawanan sosial dan kepedulian lingkungan hidup, meningkatkan pemahaman nilai wawasan keanekaragaman budaya.<sup>54</sup> Kegiatan yang dilakukan oleh organisasi Dharma Wanita dalam bidang sosial budaya merupakan peranan yang dilakukan oleh organisasi Dharma Wanita dalam bidang sosial budaya.

Peranan organisasi Dharma Wanita yang sangat penting adalah pembentukan keluarga sehat dan sejahtera. Usaha yang dilakukan oleh organisasi Dharma Wanita dalam pembentukan keluarga sehat dan sejahtera yaitu menciptakan wanita yang berkualitas. Ada empat faktor untuk menciptakan wanita yang berkualitas yaitu: faktor peningkatan kualitas pendidikan wanita, faktor peningkatan kualitas kesehatan wanita, faktor penghapusan tindak kekerasan terhadap wanita, faktor kualitas ekonomi wanita.<sup>55</sup> Pembentukan keluarga sehat dan sejahtera mampu ikut memberikan kontribusi di dalam perencanaan pengambilan keputusan, dan pelaksanaan pembangunan, sehingga hasil pembangunan dapat memenuhi

---

<sup>54</sup> Laporan Pelaksanaan Program Kerja Dharma Wanita Persatuan Kota Banjar Tahun 2008, 2008, Kota Bajar: Dharma Wanita Persatuan Kota Banjar, dapat dilihat dalam lampiran Laporan kegiatan organisasi Dharma Wanita. hlm. 154-157.

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Surtikayah Dahlan pada tanggal 1 Juli 2013, dapat dilihat dalam lampiran hasil wawancara hlm. 175.

hak-hak yang dibutuhkan kaum wanita sehingga pembangunan di Kota Banjar jauh lebih meningkat.